

Transformasi Digital untuk Penguatan Governansi Pemerintah

(Arief Rahman, Ph.D.)

Komitmen untuk menjalankan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government* dikuatkan oleh Pemerintahan Jokowi dengan terbitnya Perpres No. 95 Tahun 2018. Meskipun jika kita telusur ke belakang, inisiasi *e-government* sudah dimulai sejak 2001. SPBE bertujuan untuk mewujudkan governansi atau tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Bagaimanakah perjalanan kita dalam merealisasikan SPBE sejauh ini? Bagaimana pula dengan peluang dan tantangan ke depan, terutama di tahun 2024?

Menurut survei EDGI (*E-Government Development Index*) terakhir yang dilakukan oleh UN DESA (*United Nations Dept. Economic and Social Affairs*) pada tahun 2022, Indonesia menempati posisi ke-77 diantara 193 negara-negara anggota PBB. Posisi ini naik cukup signifikan, setelah Indonesia menempati posisi ke-88 pada survey tahun 2020, dan ke-107 pada tahun 2018. Nilai indeks yang diperoleh Indonesia juga lebih tinggi dibanding angka rerata negara-negara Kawasan Asia. Namun demikian, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa nilai untuk komponen infrastruktur telekomunikasi dan TI Indonesia masih di bawah beberapa Negara ASEAN, bahkan Vietnam.

Pengembangan SPBE di Indonesia memang menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Untuk menyebut diantaranya adalah berkaitan dengan masih tingginya kesenjangan digital (*digital divide*) dalam berbagai aspek. Masih cukup banyak masyarakat Indonesia yang tidak terjangkau koneksi internet, atau bahkan listrik. Selain itu, tingkat dan kualitas pendidikan yang juga masih belum merata juga menyebabkan tidak meratanya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi.

Masalah lain adalah bahwa SPBE yang dikembangkan oleh masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan berbagai instansi masih belum terintegrasi dengan baik. Tidak jarang kita temui bahkan dalam sebuah lembaga atau kantor mempunyai sistem yang terpisah-pisah untuk setiap urusan. Tidak kurang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pernah mengeluh bahwa pemerintah mempunyai sekitar 24.000 aplikasi! Hal ini tidak hanya inefisiensi, tetapi juga menimbulkan kebingungan bagi pengguna.

Jika kita melihat ke depan, kebutuhan untuk mempunyai sistem informasi yang baik adalah substansial dan tidak bisa dielakkan. Pembuatan keputusan dan kebijakan oleh pemerintah harus berbasis pada data yang valid. Selain itu, pelayanan publik juga harus lebih efisien dan transparan. Tidak kalah penting adalah peningkatan partisipasi publik dalam pemerintahan yang demokratis. Itu semua membutuhkan dukungan sistem informasi yang baik.

Pemerintah telah membuat Rencana Induk, Arsitektur, dan Peta Rencana SPBE. Jika kita menilik pada Rencana Induk, maka tahun 2024 adalah tahun kedua dari Tahap Pengembangan yang direncanakan untuk kurun waktu 2023-2025. Pada tahun 2024 direncanakan kita mempunyai pelayanan publik yang berbasis *Artificial Intelligence (AI)* atau kecerdasan buatan. Meskipun demikian, pondasi SPBE yang dibangun dalam jangka waktu 2018-2022 belum sepenuhnya kuat dan masih perlu dikuatkan di sana-sini.

Yang dibutuhkan oleh pemerintah pada saat ini adalah tidak hanya modernisasi alat-alat atau digitalisasi. Yang lebih mendasar adalah kebutuhan untuk melakukan transformasi digital. Transformasi digital memerlukan perubahan paradigma pemerintah dan aparat pemerintah, sehingga secara struktur dan proses juga harus bertransformasi. Ego sektoral harus dihilangkan agar integrasi dan konektivitas antarlembaga bisa dilakukan. Semua harus sadar dan kembali pada tujuan dari pengembangan SPBE.

Salam!